
DESENTRALISASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI EVALUATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR JAWA BARAT

Samsudin¹, M.B. Zubakhrum Tjenreng²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Email: DIP.13.807@ipdn.ac.id¹, zubakhrum@gmail.com²

ABSTRAK

Desentralisasi di Kota Bogor telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas alokasi anggaran, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan desentralisasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi di Kota Bogor masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi transparansi anggaran, efektivitas birokrasi, serta digitalisasi layanan publik agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keberlanjutan dalam program-program yang mendukung kesejahteraan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: desentralisasi; otonomi daerah; good governance; pelayanan publik; kesejahteraan masyarakat; kota bogor

ABSTRACT

Decentralization in Bogor City has granted local governments greater authority in managing various sectors; however, its implementation still faces challenges, including the effectiveness of budget allocation, transparency, community participation, and equitable development. The purpose of this study is to evaluate the performance of the Bogor City Government in implementing decentralization and its impact on community welfare, and to find solutions to improve the effectiveness of the policy. This study employs a qualitative method with a normative legal approach, drawing on a literature review that examines laws and regulations, government reports, and related academic literature. The results of the study indicate that the implementation of decentralization in Bogor City still needs improvement through optimizing budget transparency, enhancing bureaucratic effectiveness, and digitalizing public services to create a more inclusive government oriented towards community welfare. The implications of this study suggest the need for adjustments in decentralization policies to enhance community participation, increase transparency in budget management, and promote sustainability in programs that support local welfare. This study is expected to provide input for local governments in formulating policies that are more effective and responsive to community needs.

Keywords: *decentralization; regional autonomy; good governance; public services; public welfare; bogor city*

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan kebijakan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan mendelegasikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2015). Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan public (D Kurniawan, 2016). Secara teoritis, desentralisasi diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan local (Handraini & Frinaldi, 2024). Namun, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas birokrasi, ketimpangan fiskal antar daerah, lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta permasalahan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah (Amsyah, 2025).

Kota Bogor, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, telah mengimplementasikan desentralisasi selama lebih dari dua dekade. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, belum semua kebijakan daerah berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (WR Jati, 2012). Indikator kesejahteraan seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta akses terhadap layanan dasar masih menunjukkan adanya disparitas antarwilayah dalam kota (Aprianoor & Mukhtiali, 2015). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor tahun 2022 menunjukkan bahwa berbagai indikator seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan, dan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (BPS, 2022).

Analisis terhadap kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kebijakan tersebut sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang membuat kebijakan yang diterapkan tidak sepenuhnya menjawab tantangan lokal. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perubahan sosial, dan dinamika politik yang dapat mengganggu kelancaran implementasi kebijakan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas desentralisasi dan mencari solusi yang lebih komprehensif untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di Kota Bogor.

Studi ini akan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi desentralisasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi efektivitas alokasi anggaran dan kebijakan fiskal, kinerja pelayanan publik, serta dampak kebijakan terhadap ketimpangan dan kemiskinan (Wibowo et al., 2022). Salah satu hal yang akan dianalisis adalah apakah kebijakan alokasi anggaran daerah sudah tepat sasaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana komposisi belanja daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat apakah terdapat indikasi inefisiensi atau penyimpangan anggaran dalam realisasi belanja daerah.

Selain aspek fiskal, penelitian ini juga akan mengkaji kinerja pelayanan publik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Evaluasi ini akan mencakup kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta administrasi publik, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah. Dalam konteks partisipasi publik, penelitian ini akan melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas kebijakan yang dijalankan (Wulandari, 2024).

Dampak desentralisasi terhadap ketimpangan dan kemiskinan juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Beberapa hal yang akan dikaji adalah sejauh mana kebijakan daerah telah mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah dalam kota, serta bagaimana korelasi antara pembangunan infrastruktur dengan akses ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menilai apakah program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah telah efektif dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana desentralisasi telah berhasil dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Safitri & Widarjono, 2023).

Selain menilai efektivitas kebijakan yang sudah berjalan, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Beberapa di antaranya meliputi hambatan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta implementasi kebijakan publik (Rachman, 2021).

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam menilai efektivitas pelaksanaan desentralisasi di tingkat kota serta mengidentifikasi kebijakan yang telah berhasil dan tantangan yang masih dihadapi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model kebijakan desentralisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi tidak hanya menjadi sekadar kewenangan administratif bagi daerah, tetapi juga dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Handraini & Frinaldi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi di Kota Bogor berdasarkan teori otonomi daerah, good governance, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang menggambarkan serta mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah dalam meningkatkan efektivitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, laporan pemerintah, dan dokumen resmi terkait kebijakan daerah, serta sumber data sekunder, berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah regulasi,

kebijakan publik, serta analisis laporan dan kajian akademik terkait Kota Bogor. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan interpretatif, dengan membandingkan teori yang ada dengan realitas pelaksanaan kebijakan di Kota Bogor guna memahami efektivitas otonomi daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Achjar et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu pemerintahan membahas bagaimana kekuasaan dijalankan, kebijakan dirumuskan, serta bagaimana administrasi pemerintahan bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, pendekatan teori ilmu pemerintahan dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Beberapa teori utama yang dapat digunakan dalam analisis ini adalah Teori Good Governance, Teori Otonomi Daerah, Teori Pelayanan Publik, dan Teori Kesejahteraan Masyarakat.

1. Analisis Desentralisasi di Kota Bogor Berdasarkan Teori Otonomi Daerah

Teori otonomi daerah menjelaskan bagaimana kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam sistem desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat (Christia, 2019). Desentralisasi memungkinkan daerah memiliki kendali lebih besar dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Rondinelli dan Cheema (1983), desentralisasi menciptakan peluang bagi daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan (Rachmad et al., 2023). Namun, efektivitas otonomi daerah sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kapasitas birokrasi, sistem akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Di Kota Bogor, desentralisasi telah memberikan pemerintah daerah kewenangan dalam mengelola berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Azfirmawarman et al., 2020). Salah satu manfaat yang terlihat adalah peningkatan akses terhadap layanan publik, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, di mana pemerintah kota memiliki fleksibilitas dalam alokasi anggaran dan perencanaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kewenangan ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bogor masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya alokasi anggaran daerah. Sebagian besar anggaran daerah masih dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang lebih produktif, yang dapat langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketimpangan dalam alokasi anggaran ini menyebabkan keterbatasan dalam pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan transportasi publik yang lebih memadai.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan di Kota Bogor masih cenderung bersifat top-down, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Smith (1985), yang menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan (Setiawan, 2024). Rendahnya keterlibatan masyarakat ini juga mencerminkan lemahnya transparansi dan akses terhadap informasi terkait kebijakan yang sedang atau akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerataan pembangunan, implementasi otonomi daerah di Kota Bogor masih menghadapi tantangan signifikan. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menyentuh aspek pemerataan pembangunan, yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap layanan publik antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Misalnya, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah pinggiran masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pusat kota, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pelayanan publik. Menurut teori Smith (1985), otonomi daerah hanya akan efektif jika didukung oleh kapasitas birokrasi yang kuat, sistem akuntabilitas yang transparan, serta tingkat partisipasi publik yang tinggi. Jika ketiga elemen ini tidak berjalan dengan baik, maka otonomi daerah justru dapat memperparah ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesenjangan sosial di tingkat lokal.

2. Analisis Berdasarkan Teori Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan. Menurut UNDP (1997), suatu pemerintahan daerah yang baik harus mampu mengelola sumber daya publik dengan transparansi dan efisiensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iswahyudi et al., 2016). Implementasi good governance sangat penting dalam konteks desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Di Kota Bogor, penerapan prinsip good governance masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan Ombudsman RI tahun 2022, masih terdapat keluhan terkait kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor perizinan usaha dan layanan kesehatan. Ketidakjelasan informasi mengenai alokasi dana dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, transparansi sangat krusial karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan.

Selain transparansi, efektivitas pelayanan publik di Kota Bogor juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya mempercepat proses administrasi, beberapa layanan seperti administrasi kependudukan dan perizinan usaha masih mengalami

keterlambatan dalam pelaksanaannya. Kurangnya responsivitas dalam menangani kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas sistem birokrasi masih belum optimal. Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam good governance, di mana pemerintah harus mampu menyediakan layanan yang berkualitas dengan prosedur yang efisien. Dalam konteks Kota Bogor, masih diperlukan perbaikan dalam sistem administrasi publik agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Bogor. Masih ditemukan proyek-proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana akibat perencanaan yang kurang matang. Proyek infrastruktur yang mengalami keterlambatan atau bahkan mangkrak menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik masih belum maksimal. Dalam teori good governance, akuntabilitas tidak hanya mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga mencakup mekanisme evaluasi yang memungkinkan adanya perbaikan kebijakan berdasarkan hasil yang telah dicapai. Jika pemerintah daerah tidak memiliki sistem akuntabilitas yang kuat, maka efektivitas kebijakan yang dibuat akan sulit diukur dan diperbaiki.

Dalam kritik terhadap implementasi good governance di Kota Bogor, Dwivedi dan Henderson (1990) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan komitmen dalam menekan korupsi, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan, serta mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. Namun, dalam praktiknya, Kota Bogor masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas kebijakan daerah. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Banyak kebijakan yang diambil masih bersifat top-down tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat, sehingga menyebabkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Ketidaklibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat mengakibatkan kurangnya respons terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa masukan dan umpan balik dari masyarakat, pemerintah daerah berisiko mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal atau aspirasi masyarakat. Hal ini sering menghasilkan kebijakan yang tidak relevan dan tidak dapat diterima oleh warga, yang secara langsung berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada mekanisme yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Forum-forum ini bisa berupa lokakarya, diskusi kelompok terfokus, atau pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Selain itu, optimalisasi digitalisasi dalam pelayanan publik masih belum maksimal. Meskipun beberapa layanan sudah mulai berbasis digital, namun belum semua sistem berjalan dengan efisien. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan daring akibat kurangnya sosialisasi dan minimnya infrastruktur pendukung di beberapa wilayah. Digitalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di era modern. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih baik,

pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi masyarakat secara lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance di Kota Bogor masih memerlukan banyak perbaikan, terutama dalam aspek transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Selain itu, efektivitas layanan publik harus terus ditingkatkan dengan mempercepat birokrasi dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan juga harus diperkuat melalui sistem evaluasi yang lebih ketat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jika prinsip good governance dapat diterapkan dengan lebih baik, maka desentralisasi di Kota Bogor dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Analisis Berdasarkan Teori Pelayanan Publik

Teori pelayanan publik menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan efisien. Menurut Denhardt & Denhardt (2003), model pelayanan publik yang ideal adalah New Public Service (NPS) yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengambilan kebijakan dan penyediaan layanan. Dalam konsep ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengarkan, melibatkan, dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam memberikan layanan yang optimal. Pelayanan publik yang baik harus mencerminkan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, kualitas, serta akuntabilitas dalam setiap sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Kota Bogor, implementasi pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di daerah pinggiran. Meskipun pusat kota memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, banyak daerah pinggiran masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap layanan medis. Ketimpangan ini berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan, di mana masyarakat di daerah pinggiran harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam konsep New Public Service, seharusnya pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendistribusikan sumber daya kesehatan secara merata agar seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan medis.

Selain sektor kesehatan, kualitas pendidikan di Kota Bogor juga masih menunjukkan ketimpangan antara sekolah-sekolah negeri di pusat kota dan di daerah pinggiran. Sekolah-sekolah di pusat kota cenderung memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik, tenaga pengajar yang lebih kompeten, serta akses terhadap berbagai program pendidikan tambahan. Sebaliknya, sekolah di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas pembelajaran. Dalam perspektif pelayanan publik yang ideal, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang lokasi geografis. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di Kota Bogor perlu lebih berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas sekolah di daerah pinggiran agar kesenjangan pendidikan dapat diminimalkan.

Selain kesehatan dan pendidikan, transportasi publik dan infrastruktur di Kota Bogor juga masih menjadi permasalahan utama. Mobilitas masyarakat di pusat kota masih terganggu oleh kemacetan yang tinggi, sementara transportasi umum belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi warga karena keterbatasan rute, armada, dan sistem manajemen yang belum optimal. Infrastruktur jalan di beberapa wilayah juga masih membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Jika merujuk pada konsep pelayanan publik yang efektif, pemerintah Kota Bogor seharusnya lebih memperhatikan pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan ramah pengguna agar dapat mengurangi beban kemacetan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bermobilitas.

Kritik terhadap implementasi pelayanan publik di Kota Bogor dapat dikaji dari perspektif New Public Management (NPM) sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992). Model NPM menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengadopsi sistem manajemen berbasis hasil (*result-oriented management*) untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Namun, dalam praktiknya, kurangnya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan layanan publik di Kota Bogor menyebabkan banyak program yang berjalan tanpa hasil yang maksimal. Misalnya, program perbaikan infrastruktur atau pelayanan kesehatan sering kali tidak memiliki mekanisme evaluasi yang jelas untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Bogor, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan sistem monitoring dan evaluasi layanan, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, optimalisasi digitalisasi dalam pelayanan publik juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah dan transparan. Pemerintah daerah juga harus lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

4. Analisis Berdasarkan Teori Kesejahteraan Masyarakat

Teori kesejahteraan masyarakat menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga melalui kebijakan yang tepat sasaran (Riyanto et al., 2023). Menurut Esping-Andersen (1990), konsep negara kesejahteraan harus mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memegang peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal.

Di Kota Bogor, tantangan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat masih cukup kompleks. Salah satu indikator yang menunjukkan masih adanya permasalahan kesejahteraan adalah tingkat kemiskinan yang mencapai 5,76% pada tahun 2022 (Oktaviani, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Meskipun Kota Bogor dikenal sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, masih terdapat kesenjangan ekonomi antarwilayah, terutama dalam akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Wilayah pusat kota cenderung memiliki infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik

dibandingkan dengan daerah pinggiran, yang menyebabkan ketimpangan dalam kualitas hidup antarwarga.

Selain kesenjangan ekonomi, masalah pengangguran juga menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK masih cukup tinggi, yang mencerminkan kurangnya kesempatan kerja bagi mereka yang baru memasuki dunia kerja. Salah satu penyebab utama dari tingginya pengangguran ini adalah belum optimalnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan lulusan serta rendahnya akses terhadap program pelatihan keterampilan berbasis industri yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan industri dan keterampilan lulusan menyebabkan banyak anak muda sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menilai implementasi kebijakan kesejahteraan di Kota Bogor, pendekatan yang dikemukakan oleh Titmuss (1974) menyoroti bahwa kebijakan kesejahteraan sosial harus berbasis kebutuhan dan bersifat inklusif. Namun, dalam realitasnya, banyak program kesejahteraan di Kota Bogor yang masih bersifat generik dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat miskin atau rentan. Misalnya, program bantuan sosial sering kali tidak memperhitungkan perbedaan antara masyarakat perkotaan dan pinggiran dalam aspek biaya hidup dan akses terhadap layanan publik. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan kurang efektif dalam menjawab permasalahan kesejahteraan secara menyeluruh.

Kritik terhadap implementasi kebijakan kesejahteraan di Kota Bogor juga dapat dilihat dari aspek kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah keterbatasan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan program pelatihan vokasi atau pendidikan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat yang menganggur. Jika pemerintah Kota Bogor lebih aktif dalam menggandeng industri dan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, maka tingkat pengangguran dapat ditekan secara lebih efektif.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah peningkatan program pelatihan kerja bagi lulusan SMA dan SMK, sehingga mereka memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, terutama dalam distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah pinggiran, agar kesenjangan antarwilayah dapat diminimalkan. Program bantuan sosial juga harus dirancang lebih berbasis kebutuhan dengan mempertimbangkan karakteristik demografi masyarakat penerima manfaat, sehingga kebijakan yang diimplementasikan benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga yang paling membutuhkan.

KESIMPULAN

Desentralisasi di Kota Bogor telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam efektivitas alokasi anggaran, partisipasi masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Otonomi daerah yang dijalankan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat ketimpangan dalam akses layanan publik, terutama di daerah pinggiran. Dari perspektif good governance, masih terdapat permasalahan dalam transparansi pengelolaan anggaran, efektivitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kebijakan, yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, sistem pelayanan publik juga belum sepenuhnya merata, dengan masih adanya ketimpangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., & Rumata, N. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Yp7neaaqbaj&oi=fnd&pg=pa43&dq=Achjar,+K.+A.+H.,+Rusliyadi,+M.,+Zaenurrosyid,+A.,+Rumata,+N.+A.,+Nirwana,+I.,+%26+Abadi,+A.++\(2023\).+Metode+Penelitian+Kualitatif:+Panduan+Praktis+Untuk+Analisis+Data+Kualitatif+Dan+Studi+Kasus.+Pt.+Sonpedia+Publishing+Indonesia.&ots=E58ouswphf&sig=Wsg8u9nvuju5wi4rjtm3c86wns8](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Yp7neaaqbaj&oi=fnd&pg=pa43&dq=Achjar,+K.+A.+H.,+Rusliyadi,+M.,+Zaenurrosyid,+A.,+Rumata,+N.+A.,+Nirwana,+I.,+%26+Abadi,+A.++(2023).+Metode+Penelitian+Kualitatif:+Panduan+Praktis+Untuk+Analisis+Data+Kualitatif+Dan+Studi+Kasus.+Pt.+Sonpedia+Publishing+Indonesia.&ots=E58ouswphf&sig=Wsg8u9nvuju5wi4rjtm3c86wns8)
- Amsyah, U. (2025). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Era Desentralisasi Indonesia. *Malaqbipublisher.Comu Amsyah, S Sudardijurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (Jimbe)*, 2025•*Malaqbipublisher.Com*, 3(1), 2025. <https://malaqbipublisher.com/index.php/jimbe/article/view/391>
- Aprianoor, P., & Muktiali, D. M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. *Ejournal3.Undip.Ac.Idp Aprianoor, M Muktialiteknik Pwk (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2015•*Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 4(4), 484–498. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9809>
- Azfirmawarman, D., Naldi, H., ... A. F.-A. A., & 2024, Undefined. (2020). Analisis Demokrasi Pada Era Desentralisasi Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jaa.Hangtuah.Ac.Id*, 35(3). <https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/256>
- Christia, A. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Academia.Edu*. <https://www.academia.edu/download/69940433/Pdf.Pdf>
- D Kurniawan. (2016). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Academia.Edu Kurniawangema Eksos*, 2012•*Academia.Edu*. https://www.academia.edu/download/63430922/Materi_Otonomi-Daerah-Dan-Desentralisasi-Fiskal20200526-18597-Kgbs4l.Pdf
- Handraini, H., & Frinaldi, A. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal.Unived.Ac.Idh Handraini, A Frinaldi, L Magriasti, H Naldiprofessional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2024•*Jurnal.Unived.Ac.Id*, 11(2), 601–608. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7226>
- Iswahyudi, A. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang).

- Ejournal.Undiksha.Ac.Id*, 1(2), 151- 166. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jia/Article/View/9992>
- Oktaviani, N. (2022). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. *Journal.Unimar- Amni.Ac.Id*. <https://Journal.Unimar Amni.Ac.Id/Index.Php/Ebismen/Article/View/76>
- Rachmad, A. F., Xusan, Q. N., Azzahra, N., & Azaria, E. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Journal.Uniba.Ac.Id*, 16. <https://Journal.Uniba.Ac.Id/Index.Php/Sh/Article/View/773>
- Rachman, M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. <http://Repository.Untag-Smd.Ac.Id/375/>
- Riyanto, M., Hukum, V. K.-J. P., & 2023, Undefined. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Ejournal2.Undip.Ac.Id*, 5(2), 374–388. <https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/18164>
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. [https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Biafeqaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Partisipasi+Publik+Merupakan+Salah+Satu+Elemen+Kunci+Dalam+Mewujudkan+Otonomi+Daerah+Yang+Efektif,+Sebagaimana+Dikemukakan+Oleh+Smith+\(1985\),+Yang+Menekankan+Bahwa+Keberhasilan+Desentralisasi+Sangat+Bergantung+Pada+S eberapa+Jauh+Masyarakat+Dapat+Berkontribusi+Dalam+Proses+Perencanaan+Dan+P engambilan+Kebijakan.+&Ots=Bbtihvfmcq&Sig=Napydwdgmmdfpvgf3gkntfhqgt0](https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Biafeqaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Partisipasi+Publik+Merupakan+Salah+Satu+Elemen+Kunci+Dalam+Mewujudkan+Otonomi+Daerah+Yang+Efektif,+Sebagaimana+Dikemukakan+Oleh+Smith+(1985),+Yang+Menekankan+Bahwa+Keberhasilan+Desentralisasi+Sangat+Bergantung+Pada+S eberapa+Jauh+Masyarakat+Dapat+Berkontribusi+Dalam+Proses+Perencanaan+Dan+P engambilan+Kebijakan.+&Ots=Bbtihvfmcq&Sig=Napydwdgmmdfpvgf3gkntfhqgt0)
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal.Kemendagri.Go.Idkm Simanjuntakjurnal Bina Praja, 2015•Jurnal.Kemendagri.Go.Id*. <http://Jurnal.Kemendagri.Go.Id/Index.Php/Jbp/Article/View/38>
- Wibowo, E., (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia Pada 2010-2018. *Scholar.Archive.Orgea Wibowo, A. Oktivalerinabappenas. Working Papers, 2022•Scholar. Archive. Org*. <https://Doi.Org/10.47266/Bwp.V5i1.117>
- Wr Jati. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnalkonstitusi.Mkri.Idwr Jatijurnal Konstitusi, 2012•Jurnalkonstitusi.Mkri.Id*. <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/152>
- Wulandari, L. (2024). *Upaya Guru Paud Dalam Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini Di Kb Hamong Putra Desa Adi Jaya*. <http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/9541/>